

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Tri Prastiwi¹
Muhammad Arfan²
Darwanis³

***Abstract:** Analysis of the performance of local government districts and cities in the province Aceh on the ratio of local financial independence. This research is aimed to analyze the performance level of local government districts and towns in Aceh based on the ratio of local financial independence of the fiscal year 2013. The issue discussed was "how the performance level of local government of districts and towns in Aceh based on the ratio of local financial independence". The data used in this research are secondary data. The data are budget realization reports of districts and towns in Aceh for the fiscal year 2013. The source of data is obtained directly from the Financial Agency of Aceh. Data are analyzed by using the ratio of local financial independence. The result shows that the government performance level of districts and towns in Aceh is still very low. This is evidenced by the ratio of local financial independence of districts and towns in Aceh is still in a very low ratio because of external aid dependency is still high.*

Abstrak: Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2013. Masalah yang dibahas adalah "bagaimana tingkat kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa laporan realisasi anggaran daerah kabupaten dan kota di Aceh tahun fiskal 2013. Sumber data diperoleh langsung dari Dinas Keuangan Aceh. Data dianalisis dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Aceh masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan rasio kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Aceh yang masih berada pada rasio yang sangat rendah karena ketergantungan bantuan dari pihak eksternal masih tinggi.

Kata Kunci: Rasio kemandirian, keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang–Undang No 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang–Undang Nomor 33

¹ Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

² Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

³ Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Fenomena yang terjadi dari adanya penerapan otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah (Pemda) yang tinggi pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal juga terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dalam menentukan ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Bastian, 2010:274). Selanjutnya, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (MenPAN:2007).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Marsdiasmo, 2006).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio terhadap APBD dapat digunakan untuk (Halim, 2008:230) : Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah; Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Halim (2008), untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu sebagai berikut: Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah.

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim: 2008).

Kemampuan daerah dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerahnya antara lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan, semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran kepada alokasi belanja terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, obyek, atau peristiwa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional dengan populasi seluruh Kabupaten/Kota di Aceh (18 kabupaten dan 5 kota).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumenter. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2013.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Perimbangan + lain2 pendapatan daerah yang sah}} \times 100\%$$

..

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk melihat rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Aceh tahun anggaran 2013 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2013

Kabupaten/ kota	PAD	total pendapatan eksternal	Rasio Kemandirian
Kab. Aceh Barat	46.928.106.802,78	673.529.662.851,74	6,9675
Kab. Aceh Barat Daya	32.534.985.970,94	523.657.517.608,00	6,2130
Kab. Aceh Besar	76.107.259.036,13	863.830.390.408,18	8,8104
Kab. Aceh Jaya	20.646.749.350,17	472.129.590.075,00	4,3731
Kab. Aceh Selatan	36.181.171.784,68	737.659.975.006,00	4,9049
Kab. Aceh Singkil	18.024.823.052,70	464.151.866.009,00	3,8834
Kab. Aceh Tamiang	42.592.561.279,66	628.348.551.204,98	6,7785
Kab. Aceh Tengah	76.870.446.782,32	720.093.940.151,42	10,6751
Kab. Aceh Tenggara	25.620.560.182,10	582.546.187.103,00	4,3980
Kab. Aceh Timur	42.805.235.987,63	897.529.633.802,00	4,7692
Kab. Aceh Utara	99.869.693.144,17	1.471.352.555.852,00	6,7876
Kab. Bener Meriah	18.918.704.154,42	486.904.791.322,00	3,8855
Kab. Bireuen	93.893.140.983,71	1.029.022.714.361,99	9,1245
Kab. Gayo Lues	20.213.909.298,67	510.889.241.609,69	3,9566
Kab. Nagan Raya	37.942.005.577,87	622.353.726.698,00	6,0965
Kab. Pidie	76.878.689.101,26	946.739.201.420,00	8,1204
Kab. Pidie Jaya	14.052.583.434,81	492.635.697.295,00	2,8525
Kab. Simeulue	15.309.778.448,22	471.000.287.671,60	3,2505
Kota Banda Aceh	129.122.120.462,00	905.808.725.719,00	14,2549
Kota Langsa	57.243.381.959,77	545.553.069.011,03	10,4927
Kota Lhokseumawe	36.213.933.082,49	632.996.981.578,00	5,7210
Kota Sabang	27.377.339.119,72	422.492.065.360,00	6,4800
Kota Subulussalam	8.287.512.018,46	354.058.926.052,00	2,3407
		mean	6,3103
		min	2,3407
		max	14,2549

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Aceh yaitu sebesar 6,31%. Rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh memiliki pola hubungan instruktif yang berarti bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Aceh tergolong rendah sekali, karena tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) masih tinggi. Hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh masih tergolong rendah. Karena, pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan masih tergantung pada penerimaan pemerintah pusat dan provinsi.

Rasio kemandirian tertinggi sebesar 14,25% diperoleh Kota Banda Aceh dan rasio kemandirian terendah sebesar 2,34% diperoleh Kota Subulussalam. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki kemandirian keuangan tertinggi dibanding dengan

Kabupaten/Kota di Aceh lainnya, dan Kota Subulussalam memiliki kemandirian keuangan terendah dibanding dengan Kabupaten/Kota di Aceh lainnya.

Untuk itu perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan rasio kemandirian yang masih rendah sebesar 6,31%. Yang berarti tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) masih tinggi.

Saran, Perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif lainnya dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah rasio yang digunakan, obyek penelitian, tahun yang digunakan dan menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap..

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009-2011. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.

Halim, A. (2008). Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2006). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Mianti, R. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir. Skripsi. Universitas Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.

_____, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Purwaningsih, I. (2013).